

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Zainal Asikin Amirudin. 2016. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Syed Hussein Alatas. (Usman, Al Ghozi). 1983. *Sosiologi Korupsi Sebuah Penjelajahan Dengan Data Kontemporer*. Jakarta: LP3ES.
- Didiek M Arief. dan Gultom Elisatris. 2005. *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Bandung : Refika Aditama.
- Elwi Danil. 2016. *Korupsi Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Andi Hamzah. 2016. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ranuhandoko I.P.M. 2006. *Terminologi Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Mansur Kartayasa. 2017. *Korupsi dan Pembuktian Terbalik*. Jakarta: Kencana.
- Kristian., Yopi Gunawan. 2013. *Sekelumit Tentang Penyadapan Dalam Hukum Positif di Indonesia*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta. Prenadamedia Group.
- Soerjono Soekanto . 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.

### B. Jurnal

- AA Gede Krishna. Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Penyadapan Untuk

Mengungkap Tindak Pidana Korupsi, 14.

Andi Rachmad. Legalitas Penyadapan Dalam Proses Peradilan Pidana Di Indonesia. *Jurnal Hukum Keadilan*. 11 (2), 241.

Bastianti Nugroho. 2017. Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut KUHAP. 32(1), 21.

Enan Sugiarto. 2016. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 Terhadap Informasi Elektronik Dan/Atau Dokumen Elektronik Dan/Atau Hasil Cetaknya Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Perdata. *Jurnal Hukum*. 11 (2), 182-199.

Fridolin Tahulending. 2018. Penyadapan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. VII (6), 20.

Hwian Christanto. 2016. Tindakan Penyadapan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana. *Jurnal Hukum*. 1(2), 100.

Ipakit Ronaldo. 2015. Urgensi Pembuktian Alat Bukti Dalam Praktik Peradilan Pidana. IV (2), 89.

Mohammad Fahmi Amrullah. 2020. Kekuatan Alat Bukti Penyadapan Pada Perkara Korupsi. *Jurnal Hukum*. 26 (12), 1402.

Rr. Silvi Habsari Duria Sumariyastuti. 2019. Penyadapan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Hukum*. 2 (2), 139-140.

### **C. Tesis**

Fahririn, *Pengaturan Penyadapan Oleh Aparat Penegak Hukum Dalam Proses Penyidikan Perkara Pidana Dari Perspektif Hak Asasi Manusia*, (Tesis Universitas Andalas 2018).

#### **D. Skripsi**

Simanjuntak Danny Fresly. 2019. Tinjauan Hukum Penyadapan (Wire Tapping) Terhadap Legalitas Dalam Pelaksanaan Tugas Jaksa Guna Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi. Skripsi. Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum Universitas Dharmawangsa, Medan.

#### **E. Peraturan perundang-undangan**

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana yang disebut dengan Kitap Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembrantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Undang-Undang Narkotika.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan

Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang

Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor

11/PER/M.KOMINFO/02/2006 tentang Teknis Penyadapan Terhadap Informasi.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun

2010 Tentang Tata Cara Penyadapan Pada Pusat Pemantaun Kepolisian Negara Republik Indonesia

## **F. Putusan**

Putusan Mahkamah Konstitusi 006/PUU-I/2003

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-VIII/2010

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016

## G. Internet

<https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/c15461/syarat-dan-kekuatan-hukum-alat-bukti-elektronik/>

<https://kbbi.web.id/sadap>

[www.husendro.blogspot](http://www.husendro.blogspot),

<https://www.transiskom.com/.2016/03/pengertian-studi-kepuustakaan.html?m=1>

<http://www.majalahtrust.com>

<https://nasional.kompas.com/read/2012/10/01/11165291/Penyadapan.Terbukti.Membongkar.Korupsi..>

<https://blog.inkuiri.com/inilah-metode-penyadapan-yang-sering-digunakan-oleh-para-penegak-hukum>.

<https://news.detik.com/berita/d-4710811/melihat-rumitnya-prosedur-bnn-melakukan-penyadapan-gembong-narkoba>.

<https://nasional.kompas.com/read/2019/09/16/10075601/apa-saja-ketentuan-penyadapan-yang-diatur-dalam-draf-revisi-uu-kpk>,

Supriyadi Widodo Eddyono & Erasmus A. T. Napitupulu. Komentari atas Pengaturan Penyadapan Dalam Rancangan KUHAP. Institute for Criminal Justice Reform. Jakarta. 2013, hlm. 7.

Indonesia Legal Center Publishing, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, ILCP, Jakarta, 2006, hlm. 119.